

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih tinggi (Adriyanto *et al.*, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan dalam upaya penurunan angka pengangguran dan kenyataan bahwa banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (Suhandi *et al.*, 2021). Kota Makassar, sebagai salah satu kota strategis di Indonesia bagian timur, mengalami masalah yang sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar mengalami fluktuasi dari tahun 2000 hingga 2023, dengan peningkatan signifikan pada beberapa tahun tertentu.

Kesenjangan ini tidak hanya terkait dengan aspek praktis penyediaan lapangan kerja, tetapi juga mengenai aspek teoretis tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

Menurut Cahyani & Marhaeni (2022), secara teoretis ada hubungan negatif pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Namun, kenyataannya menunjukkan meskipun



pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar relatif tinggi, tingkat pengangguran masih berada di atas rata-rata nasional. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan teoretis yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Makassar.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa pengangguran dipengaruhi tidak hanya oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh variabel lain seperti pengeluaran pemerintah, inflasi, dan investasi. Penelitian oleh Choirunnisa & Khoirudin (2024) menunjukkan bahwa investasi memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kapasitas produksi. Sebaliknya, penelitian oleh Astuti *et al.* (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat memperburuk kondisi pengangguran. Dengan demikian, kesenjangan teoretis masih ada dalam memahami variabel ekonomi mempengaruhi pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah, misalnya, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan sektor publik (Aruan *et al.*, 2023). Namun, di Kota Makassar, meskipun pengeluaran pemerintah meningkat setiap tahun, tingkat pengangguran tetap tinggi. Ini



likasikan bahwa pengeluaran pemerintah belum efektif dalam akan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja

yang terus bertambah (Amrullah *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dalam mengurangi pengangguran terbuka.

Selain pengeluaran pemerintah, inflasi juga merupakan variabel penting yang perlu diperhatikan dalam analisis pengangguran. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang terkendali dapat mendorong sektor produksi untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja (Hasibuan, 2023).

Namun, data inflasi di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun (2014-2023). Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang beragam terhadap pengangguran, tergantung pada kondisi ekonomi makro yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh inflasi terhadap pengangguran terbuka di Kota Makassar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Investasi juga dianggap sebagai salah satu penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja. Penelitian oleh Sapthu (2023), investasi dalam pembangunan infrastruktur dan sektor produktif dapat membuka lebih banyak peluang kerja. Selanjutnya penelitian Mufadhdhal & Fakhrudin (2023), mengungkapkan rendahnya minat investasi, terutama di sektor-sektor padat karya, dapat menghambat penyerapan tenaga kerja.



Makassar, meskipun terdapat peningkatan investasi di beberapa angka pengangguran terbuka masih relatif tinggi. Ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan bahwa investasi akan menciptakan lapangan kerja dan kenyataan bahwa investasi tidak sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar (Aisyah *et al.*, 2023).

Fenomena pengangguran terbuka di Kota Makassar patut diteliti karena, meskipun kota ini merupakan pusat ekonomi di Indonesia bagian timur, tingkat pengangguran terbuka masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar mencapai puncaknya pada tahun 2007 dengan 18,00 persen dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 15,92 persen akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran di luar pertumbuhan ekonomi dan investasi, seperti kebijakan pemerintah dalam mengelola angkatan kerja dan situasi global yang mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja (Komariyah *et al.*, 2019).

Teori Hukum Okun menyatakan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seharusnya diiringi dengan penurunan angka pengangguran (Depi *et al.*, 2020). Namun, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB Kota Makassar tidak selalu diikuti oleh penurunan angka pengangguran. Hal ini menyiratkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak

erfokus pada pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap



pengangguran, tetapi juga mengeksplorasi peran variabel independen, seperti inflasi dan investasi.

Penelitian ini menghipotesiskan bahwa variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah, inflasi, dan investasi memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembangunan infrastruktur (Pratiwi & Indrajaya, 2019). Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menjadi penghambat, sementara investasi berperan sebagai pendorong utama dalam menciptakan lapangan kerja baru (Anwar, 2022).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan mengintegrasikan beberapa variabel ekonomi yang sebelumnya hanya diteliti secara terpisah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi pemerintah daerah dalam upaya mengurangi pengangguran terbuka, terutama melalui optimalisasi pengeluaran pemerintah dan peningkatan iklim investasi.

Pada akhirnya, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak variabel-variabel

terhadap pengangguran terbuka, serta bagaimana pemerintah dan swasta dapat bekerja sama dalam menciptakan lebih banyak



lapangan kerja. Penelitian ini juga akan menguji hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah, inflasi, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengangguran di daerah lain.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap pengangguran terbuka baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Kota Makassar.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.



2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran terbuka baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pengangguran terbuka baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Kota Makassar.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi terkait pengaruh variabel-variabel makroekonomi, seperti pengeluaran pemerintah, inflasi, dan investasi terhadap pengangguran terbuka. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada dengan mengintegrasikan variabel-variabel ekonomi lain yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan tersebut, seperti inflasi dan investasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut di bidang ekonomi ketenagakerjaan dan makroekonomi daerah.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**



Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan asan bagi pelaku ekonomi, termasuk investor dan sektor industri,

dalam memahami dampak dari inflasi dan investasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan pemahaman ini, sektor swasta dapat mengembangkan strategi investasi yang lebih optimal dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka di Kota Makassar. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi sektor industri dalam menentukan kebijakan upah, mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat.

#### **1.4.3. Kegunaan Kebijakan**

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah daerah di Kota Makassar, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi utama yang berpengaruh terhadap pengangguran terbuka dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengeluaran pemerintah, pengendalian inflasi, dan peningkatan iklim investasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Inflasi

Pengangguran dan inflasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap individu, masyarakat, serta perekonomian secara keseluruhan. Tingkat inflasi dapat berfluktuasi dari satu periode ke periode lainnya dan bervariasi antar negara (Simanungkalit, 2020). Menurut teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Hume dalam Mankiw (2013), bank sentral memiliki kendali besar atas tingkat inflasi melalui pengawasan jumlah uang yang beredar. Jika bank sentral mampu menjaga kestabilan jumlah uang beredar, harga barang dan jasa akan tetap stabil. Sebaliknya, apabila bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, harga-harga akan naik dengan cepat, memicu inflasi (Sirait, 2019).

Menurut Sukirno (2011) inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sementara itu, Meiditambua et al. (2023) menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus menerus, sedangkan Maulana & Maulana (2024), mengungkapkan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama periode tertentu. Dari berbagai definisi tersebut, inflasi dapat disimpulkan sebagai fenomena kenaikan harga-harga yang berlanjut selama



ode, meskipun tidak terjadi secara seragam pada semua barang atau  
aikan harga biasanya terjadi pada sebagian besar barang, tetapi  
ingkat yang berbeda-beda.

Inflasi dapat digolongkan ke dalam tiga jenis berdasarkan cakupan dan pengaruhnya terhadap harga. Pertama, inflasi tertutup (*closed inflation*), di mana kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang dan biasanya berada pada kisaran 10-30 persen per tahun. Jenis inflasi ini dianggap moderat. Kedua, inflasi terbuka (*open inflation*), yang terjadi ketika kenaikan harga meluas ke hampir semua jenis barang. Inflasi terbuka, dengan kisaran kenaikan harga 30-100 persen per tahun, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menghambat investasi, dan menurunkan ekspor. Ketiga, hiperinflasi (*hyperinflation*), yang ditandai oleh kenaikan harga di atas 100 persen per tahun, di mana harga-harga berubah secara drastis dan terus menerus sehingga orang tidak dapat menyimpan uang lebih lama karena nilainya terus menurun (Sirait, 2019).

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif, namun dampak negatifnya sering kali lebih dominan. Para ahli ekonomi, baik konvensional maupun Islam, sepakat bahwa inflasi membawa konsekuensi buruk bagi perekonomian. Dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, serta tingkat produk nasional. Hyperinflation, misalnya, sangat merugikan produsen, konsumen, dan pemerintah, serta mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketika inflasi tidak dikendalikan, tingkat inflasi cenderung semakin cepat meningkat, berdampak buruk terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi penabung, kreditor, debitor, dan produsen (Qomaruddin, 2018; Basuki & Nengsih, 2024).



Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat dapat dilihat dari aspek. Pertama, inflasi mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena daya beli masyarakat menurun, terutama bagi mereka yang

berpendapatan tetap. Kenaikan harga yang lebih cepat daripada kenaikan upah menyebabkan upah riil menurun, sehingga masyarakat mengalami penurunan standar hidup. Kedua, inflasi memperburuk distribusi pendapatan. Mereka yang berpendapatan tetap akan mengalami kemerosotan nilai riil dari pendapatan mereka, sementara pemilik kekayaan dalam bentuk uang juga akan merasakan penurunan nilai aset mereka. Akibatnya, inflasi memperlebar kesenjangan pendapatan di antara golongan masyarakat yang berbeda (Qomaruddin, 2018; Nurhasanah & Nugroho, 2024).

### 2.1.2 Teori Investasi

Menurut Kurniawan (2024), investasi berperan penting dalam perekonomian karena memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Dalam konsep ekonomi makro, investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan stok modal fisik (Sukirno, 2011). Investasi ini secara langsung meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan output dan pendapatan masyarakat (Mahriza, 2019). Ketersediaan data mengenai modal dan inventori dapat diukur melalui dua pendekatan statistik, yaitu sebagai arus (*flow*) dan sebagai stok (*stock*) (Sukaini & Othman, 2022).

Dornbusch *et al.* (2014), membagi investasi ke dalam tiga komponen utama, yaitu investasi tetap dunia usaha (*business fixed investment*), investasi persediaan (*inventory investment*), dan investasi tempat tinggal (*residential investment*). Investasi tetap dunia usaha mencakup pengeluaran untuk infrastruktur industri seperti pabrik atau bangunan komersial, pembelian peralatan produksi dan mesin-mesin baru yang bertujuan untuk



meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Investasi jenis ini sangat penting dalam meningkatkan output jangka panjang, mengingat bahwa pengeluaran untuk barang modal seperti mesin dan fasilitas produksi memiliki efek yang berkelanjutan terhadap produktivitas.

Selanjutnya, investasi persediaan mengacu pada pengeluaran yang bertujuan menambah stok barang yang diproduksi atau bahan baku yang akan digunakan untuk produksi di masa depan. Investasi ini berfungsi untuk memastikan kelancaran operasi produksi tanpa gangguan akibat kekurangan bahan baku atau stok barang yang akan dipasarkan. Meskipun terlihat sederhana, investasi persediaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses produksi dan mendukung stabilitas operasional bisnis (Mahrani, 2023).

Investasi tempat tinggal (*residential investment*), di sisi lain, merujuk pada investasi yang dilakukan untuk membangun atau membeli perumahan. Investasi ini berkontribusi secara signifikan dalam menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan nilai aset real estat di suatu wilayah. Dalam skala makroekonomi, peningkatan investasi di sektor perumahan juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mengingat sektor ini melibatkan banyak tenaga kerja dan bahan baku (Fadhilah, 2021).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan investasi fisik dalam perekonomian adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan penambahan atau pengurangan aset tetap pada perusahaan. PMTB digunakan sebagai ukuran investasi dalam barang modal yang memiliki masa pakai lebih dari satu tahun, seperti bangunan, mesin, dan



peralatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PMTB tidak termasuk barang konsumsi dan biasanya diklasifikasikan berdasarkan jenis barang modal, sektor institusi, serta lapangan usaha. Dalam konteks ini, PMTB mencakup investasi di berbagai sektor ekonomi yang mendukung pembangunan jangka panjang dan pertumbuhan kapasitas produktif suatu negara (Aisyah *et al.*, 2023).

### 2.1.3 Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah merujuk pada belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, layanan keamanan melalui polisi dan tentara, gaji pegawai pemerintah, serta pembangunan infrastruktur (Sultan *et al.*, 2023). Belanja ini berfokus pada melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, serta jaminan sosial. Prioritas belanja ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan standar belanja, harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal (UU No. 32 Tahun 2004).

Pengeluaran daerah mencakup semua belanja yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, yang secara langsung mengurangi ekuitas dana daerah dan tidak dikembalikan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah memiliki beberapa tujuan penting, yaitu sebagai gambaran rasionalisasi penggunaan sumber daya finansial dan material yang tersedia di suatu daerah, alat untuk menyempurnakan rencana kegiatan yang telah an, serta sebagai instrumen pengawasan terhadap pengeluaran h. Selain itu, belanja daerah juga berfungsi sebagai landasan yuridis



formal dalam penggunaan penerimaan daerah, serta sebagai alat untuk memutuskan alokasi pembiayaan program dan proyek yang diusulkan. Secara umum, belanja daerah juga berperan sebagai pedoman dan tolok ukur pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah (Amin, 2020).

Menurut Safitri (2022), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan belanja pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup biaya-biaya operasional pemerintah, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, pemeliharaan, serta perjalanan dinas. Sementara itu, belanja pembangunan berfokus pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan raya dan irigasi, maupun peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Selain itu, belanja pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan perumahan, serta peningkatan kapasitas pemerintah melalui pengembangan aparatur (Telaumbanua & Ziliwu, 2022).

Pengeluaran pemerintah juga dapat dikategorikan menurut fungsinya. Fungsi pelayanan umum mencakup belanja yang mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan Pemilu. Fungsi anggaran militer, atau pengeluaran untuk pertahanan, digunakan untuk mendukung dan mempertahankan kekuatan angkatan bersenjata. Fungsi ketertiban dan keamanan meliputi penyelenggaraan pemasyarakatan, pengembangan peralatan Polri, serta peningkatan pelayanan keamanan masyarakat. Fungsi ekonomi bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui inanan transportasi, infrastruktur, energi, serta pengembangan UMKM asi. Fungsi lingkungan hidup meliputi belanja yang diarahkan untuk



upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengendalian, pemeliharaan, dan penataan lingkungan hidup demi keberlanjutan ekosistem (Nahumuri, 2019).

#### 2.1.4 Konsep Belanja Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban yang diakui oleh daerah dan berfungsi sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan wajib mencakup kebutuhan mendasar terkait hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang disesuaikan dengan potensi daerah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan keunggulan lokal (Sutrisna, 2020).

Belanja daerah direncanakan sebagai perkiraan beban pengeluaran yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, terutama dalam pemberian pelayanan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Untuk mendukung penelitian ini, klasifikasi belanja yang digunakan adalah klasifikasi berdasarkan perintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ini dirancang agar selaras dengan pengelolaan keuangan negara dan



Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi mencakup berbagai sektor pelayanan. Fungsi pelayanan umum meliputi belanja administrasi umum, operasi, pemeliharaan, dan belanja modal yang hasilnya langsung dinikmati oleh masyarakat. Fungsi ketertiban dan keamanan bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan publik. Fungsi ekonomi mencakup anggaran untuk infrastruktur transportasi, pertanian, pengairan, dan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Fungsi lingkungan hidup berfokus pada pendanaan kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Amin, 2020).

Fungsi perumahan dan fasilitas umum dialokasikan untuk penyediaan perumahan dan fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat. Fungsi kesehatan berperan dalam pembiayaan layanan kesehatan, seperti obat-obatan, pelayanan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, dan penelitian di bidang kesehatan. Fungsi pariwisata dan budaya mendanai program pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya. Fungsi agama dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kehidupan beragama, termasuk peningkatan kerukunan antarumat beragama dan pelayanan keagamaan lainnya (Amin, 2020).

Fungsi pendidikan meliputi anggaran yang dialokasikan untuk seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, serta untuk penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.



Fungsi perlindungan sosial mencakup alokasi anggaran untuk layanan sosial, pemberdayaan perempuan, pelayanan keuangan sosial,

bantuan perumahan, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Amin, 2020).

### 2.1.5 Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pemerataan pendapatan dalam perekonomian dapat dicapai melalui pengeluaran pemerintah, yang mencakup pengeluaran rutin negara untuk berbagai kebutuhan (Hartati, 2021). Belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dirancang untuk mempercepat investasi, meningkatkan kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pembangunan nasional (Irawan, 2023).

Pengeluaran pemerintah sangat bervariasi, namun dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pertama, pengeluaran yang berfungsi sebagai investasi untuk memperkuat dan meningkatkan ketahanan ekonomi di masa depan. Kedua, pengeluaran yang langsung meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketiga, pengeluaran yang memberikan manfaat berupa penghematan untuk masa yang akan datang. Keempat, pengeluaran yang bertujuan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja serta memperluas daya beli masyarakat (Purwanti, & Rahmawati, 2021).

Belanja pemerintah juga berperan penting dalam menyeimbangkan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, pendapatan negara perlu ditingkatkan, terutama melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (Amin, 2020). Meskipun total belanja pemerintah



...usi signifikan terhadap pendapatan nasional, yang lebih penting komposisi dan struktur pengeluaran tersebut. Pengeluaran pemerintah dilaksanakan secara strategis untuk mendukung tujuan pembangunan

nasional, yang mencakup alokasi dana dan perencanaan keuangan negara yang efektif (Purwanti & Rahmawati, 2021).

Menurut Mongan (2019), pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sering disebut sebagai pembayaran transfer. Transfer ini bertujuan untuk mengalirkan pendapatan kepada individu yang tidak mampu menyediakan pelayanan atau kompensasi sebagai imbalan langsung atas pendapatan yang mereka terima. Defisit anggaran juga mempengaruhi alokasi sumber daya dan memperbesar ukuran sektor pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, defisit anggaran dapat mempengaruhi harga dan tingkat bunga, yang pada akhirnya berdampak pada distribusi pendapatan (Nuraisah *et al.*, 2024).

Pengeluaran pemerintah sering kali mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait pembelian barang dan jasa. Teori belanja pemerintah, menurut pendekatan makroekonomi, mencakup analisis terhadap biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut (Amin, 2020). Berdasarkan pengalaman negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, Wagner menemukan bahwa ketika pendapatan per kapita meningkat dalam suatu perekonomian, pengeluaran pemerintah juga cenderung meningkat. Wagner juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi diiringi dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antara industri, pemerintah, dan masyarakat. Meskipun demikian, kelemahan dari Hukum Wagner adalah bahwa teori ini tidak berdasarkan pada legitimasi yang kuat, melainkan pada pandangan teori organik negara (Surgawati, 2020).



### Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara yang berlangsung secara berkesinambungan menuju perbaikan dalam jangka waktu tertentu (Dinilhaq & Azhar, 2024). Secara umum, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau PDRB disuatu wilayah dalam periode tertentu, di mana PDB yang lebih tinggi dari periode sebelumnya menunjukkan adanya pertumbuhan (Sultan *et al.*, 2023). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika output barang dan jasa yang diproduksi meningkat, tanpa memperhatikan laju pertumbuhan lebih besar atau lebih kecil daripada laju pertumbuhan penduduk (Jubir *et al.*, 2023).

Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat (Cahyani & Marhaeni, 2022). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produktif suatu perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan kuantitatif dalam ekonomi, yang biasanya diukur melalui PDB atau pendapatan per kapita (Darwin Lie, 2022).

Menurut Ananda (2018), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi warganya dalam jangka panjang. Proses peningkatan produksi ini menitikberatkan pada tiga elemen utama: proses, peningkatan produksi per kapita, dan keberlanjutan jangka panjang (Kholik, 2020). Sumber pertumbuhan dapat diperoleh melalui kemajuan teknologi, ketersediaan sumber daya manusia, dan peningkatan modal. Modal, baik dari sektor publik maupun



swasta, memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi. Misalnya peningkatan modal adalah investasi di sektor industri, seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin produksi (Acemoglu, 2012; Sirait, 2019).

Pandangan klasik tentang pertumbuhan ekonomi juga menekankan pentingnya faktor-faktor seperti jumlah penduduk, ketersediaan stok barang modal, luas lahan, kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan (Runtunuwu, 2023). Menurut Kamal (2020), permintaan terhadap tenaga kerja mirip dengan barang-barang lain dalam ekonomi, di mana produksinya diatur oleh permintaan dan penawaran. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kegiatan ekonomi berkembang dan barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat (Hartati, 2021).

Todaro (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ini didorong oleh kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan, serta perubahan ideologi yang mendukung pengembangan ekonomi (Dinilhaq & Azhar, 2024). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang berkelanjutan, di mana kapasitas produktif suatu negara terus meningkat dari tahun ke tahun, menghasilkan pendapatan dan produksi yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Susanto & Pangesti, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan  
inan ekonomi suatu negara. Dalam analisis makroekonomi,  
ian ekonomi diukur melalui peningkatan pendapatan nasional riil,  
unjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan



(Susanto, 2017). Peningkatan kapasitas produksi yang berkelanjutan memungkinkan terjadinya penyesuaian teknologi sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi yang ada, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi nasional (Susanto & Pangesti, 2021).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang mencerminkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa bagi masyarakatnya. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan teknologi, investasi dalam modal fisik, serta adaptasi kelembagaan yang memperkuat daya saing ekonomi (Parjiono, 2018).

### 2.1.7 Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang (Muslim, 2014). Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi, tujuan utamanya adalah menurunkan tingkat pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

Pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia, dengan tingkat upah dan harga yang berlaku (Suhendra & Wicaksono, 2020).

Menurut Murphy (2020), pengangguran sering kali diukur menggunakan tingkat pengangguran, yang dihitung sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Pengangguran dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, di antaranya pengangguran friksional, struktural, dan siklikal. Pengangguran friksional terjadi karena transisi individu



dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya atau karena perubahan dalam preferensi dan keahlian. Pengangguran struktural disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sedangkan pengangguran siklikal terjadi akibat fluktuasi ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja pada saat resesi ekonomi (Stiglitz, 2017).

Pengangguran juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial. Blanchard dan Katz (2019) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketegangan sosial. Penurunan pendapatan yang dialami oleh pengangguran tidak hanya mempengaruhi konsumsi individu, tetapi juga berpotensi menambah beban pada sistem kesejahteraan sosial negara.

Penyebab pengangguran bervariasi dan meskipun hal ini tidak diinginkan, pengangguran tetap menjadi masalah serius di banyak negara. Menurut Suhandi *et al.* (2021), ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran, antara lain ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, serta ketidakseimbangan antara jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Selain itu, peningkatan peranan angkatan kerja wanita dan ketidakmerataan penyediaan serta pemanfaatan tenaga kerja antar daerah juga berkontribusi pada masalah pengangguran (Wijayanto & Sutopo, 2020).



kirno (2011) membagi pengangguran menjadi tiga jenis utama. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), yaitu tenaga kerja yang

tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kedua, pengangguran terselubung (*disguised unemployment*), di mana tenaga kerja yang ada terlalu banyak untuk satu unit pekerjaan, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja tersebut tidak akan mempengaruhi produksi. Ketiga, setengah menganggur (*underemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu.

Pengangguran juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pengangguran terjadi karena kurangnya permintaan agregat, sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit (Todaro, 2004). Sementara itu, dari sisi penawaran, pengangguran disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja. Post Keynesian berpendapat bahwa pengangguran di negara-negara berkembang, khususnya yang berbasis agraris, akan terus terjadi kecuali kebijakan domestik diarahkan untuk lebih memprioritaskan penciptaan lapangan kerja (Todaro, 2004).

Menurut Mankiw (2013), pengangguran akan selalu ada dalam setiap perekonomian. Hal ini disebabkan oleh adanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pencarian kerja dan adaptasi dengan pekerjaan, serta adanya kekakuan upah yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Gaffari & Handayani (2019) mendefinisikan pengangguran sebagai individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2014) memberikan definisi pengangguran, yaitu penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, takkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus  
 sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Konsep  
 uran terbuka yang digunakan oleh BPS mengikuti panduan dari



*International Labour Organisation* (ILO), yang mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Marini & Putri, 2019).

Pengangguran, baik dari sisi definisi maupun penyebabnya, merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk dinamika pasar tenaga kerja, kebijakan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat (Suhandi *et al.*, 2021).

## 2.2. Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terbuka

Pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur dan layanan sosial dapat memiliki dampak langsung terhadap pengurangan pengangguran terbuka (Amin, 2020). Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik, terutama di sektor konstruksi dan pengembangan infrastruktur, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat, sehingga dapat menyerap lebih banyak angkatan kerja (Sultan *et al.*, 2023). Selain itu, pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada pembangunan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Purwanti & Rahmawati, 2021).

Sektor-sektor produktif yang bergantung pada peningkatan infrastruktur layanan publik akan berkembang, yang selanjutnya berpotensi menurunkan tingkat pengangguran (Irawan, 2023). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, lebih banyak lapangan kerja tercipta, baik



secara langsung melalui proyek-proyek pemerintah maupun tidak langsung melalui pengaruhnya pada sektor-sektor lain yang turut berkembang (Todaro, 2004; Susanto & Pengesti, 2021).

### **2.2.2 Hubungan Antara Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terbuka**

Inflasi yang terjadi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka, karena kenaikan harga barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan konsumsi menurun dan produksi melemah, sehingga mengurangi permintaan tenaga kerja (Qomaruddin, 2018; Nurhasanah & Nugroho, 2024; Basuki & Nengsih, 2024). Sebaliknya, inflasi yang terkendali menciptakan stabilitas ekonomi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan berinvestasi (Mankiw, 2013; Sirait, 2019), serta mendorong pertumbuhan produksi dan penciptaan lapangan kerja (Simanungkalit, 2020; Qomaruddin, 2018). Inflasi yang moderat juga memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas produksi dan perluasan sektor usaha (Sukirno, 2011; Dinilhaq & Azhar, 2024; Susanto & Pangesti, 2021). Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi yang mampu menurunkan pengangguran terbuka dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004; Hartati, 2021).

### **2.2.3 Hubungan Antara Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terbuka**



Investasi di sektor-sektor padat karya berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi, peningkatan stok modal fisik akan memperluas kapasitas produksi

(Sukirno, 2011; Mahriza, 2019). Investasi tetap dari sektor swasta maupun pemerintah, seperti pembangunan pabrik dan pengadaan mesin, mendorong peningkatan output dan kebutuhan tenaga kerja secara langsung (Dornbusch et al., 2014; Kurniawan, 2024). Selain itu, investasi dalam sektor konstruksi dan manufaktur yang berkelanjutan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menekan tingkat pengangguran terbuka (Fadhilah, 2021; Mahrani, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi juga berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja baru di sektor-sektor terkait, sehingga mempercepat penurunan pengangguran (Acemoglu, 2012; Aisyah et al., 2023).

#### **2.2.4 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terbuka**

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi biasanya diiringi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Dinilhaq & Azhar, 2024; Sultan et al., 2023). Dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kuat mencerminkan perluasan sektor-sektor produktif, seperti industri, perdagangan, dan jasa, yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah lebih besar (Jubir et al., 2023; Hartati, 2021). Dengan bertambahnya lapangan kerja, terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, terutama bagi angkatan kerja aktif yang sebelumnya menganggur (Susanto & Pangesti, 2021). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diduga memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka, karena meningkatnya kapasitas produksi dan



mendorong penciptaan lapangan kerja baru (Parjiono, 2018; Aisyah et al., 2023). Sejalan dengan pandangan Todaro (2004), peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh investasi, teknologi, dan

penyesuaian kelembagaan akan memperbesar kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

### 2.3. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris ini membahas pengaruh variabel makroekonomi seperti pengeluaran pemerintah, inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di berbagai negara, termasuk Indonesia, Kenya, Makedonia Utara, India, dan Turki. Penelitian-penelitian yang diulas menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal, alokasi investasi, tingkat inflasi, serta laju pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Masing-masing studi menunjukkan dinamika yang berbeda berdasarkan konteks ekonomi dan geografis, namun secara keseluruhan, kebijakan yang efektif pada sektor-sektor produktif dan pengendalian inflasi terbukti memainkan peran penting dalam pengurangan pengangguran di negara-negara tersebut.

Penelitian oleh Pratiwi & Indrajaya (2019) mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur, terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran untuk sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama dalam sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya. Hal ini mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran. Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur berperan penting dalam pengurangan li Bali. Selain itu, Wiasih & Karmini (2021) juga menemukan bahwa mbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB dapat meningkatkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan



lapangan kerja seringkali membuat PDB yang meningkat tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, turut mempengaruhi pengangguran di Bali.

Setyadi & Oktaviana (2021) meneliti investasi di Provinsi Banten, Indonesia, yang terfokus pada sektor-sektor seperti listrik, gas, dan telekomunikasi. Meskipun investasi meningkat, sektor-sektor ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran karena sektor-sektor tersebut cenderung tidak padat karya. Penelitian ini menyarankan agar investasi lebih diarahkan pada sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, seperti agribisnis, untuk mempercepat penurunan pengangguran di provinsi tersebut.

Khoirudin & Kurniawan (2023) meneliti pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa investasi yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, sektor-sektor yang lebih kapital intensif seperti properti tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran, sehingga penting untuk mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang lebih padat karya di Indonesia.

Setyadi & Oktaviana (2021) menunjukkan bahwa investasi di sektor-sektor yang memerlukan banyak tenaga kerja dapat mempercepat penurunan pengangguran terbuka di Banten, Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa investasi meningkat di Banten, sektor-sektor seperti listrik, gas, dan yang menjadi prioritas investor di Banten tidak memberikan dampak pengurangan pengangguran. Mereka merekomendasikan bahwa



peningkatan investasi di sektor agribisnis akan sangat membantu dalam mengurangi pengangguran di provinsi tersebut.

Meiditambua et al. (2023) mengkaji pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, yang pada gilirannya mengurangi minat investor untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan memperburuk tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan pengendalian inflasi yang efektif untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Kristi et al. (2022) meneliti pentingnya investasi di sektor produktif seperti manufaktur dan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa sektor-sektor padat karya memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Namun, investasi di sektor-sektor yang tidak terlalu padat karya, seperti properti dan perdagangan, tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan investasi pada sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian oleh Matheka & Etyang (2023) di Kenya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pengeluaran yang tidak terfokus atau alokasi yang tidak efisien sering kali gagal memberikan dampak yang diinginkan dalam mengurangi pengangguran. Penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi dalam alokasi pemerintah untuk sektor-sektor infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kenya.



Meiditambua et al. (2023) juga meneliti pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang pada gilirannya mengurangi minat investor untuk melakukan ekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru. Inflasi yang tinggi mengganggu kestabilan ekonomi dan memperburuk pengangguran di Indonesia, yang menunjukkan perlunya kebijakan pengendalian inflasi untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil.

Sinha (2022) meneliti pengaruh pengeluaran modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di India. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi yang terfokus pada sektor padat karya, seperti manufaktur, memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan pengangguran dibandingkan dengan investasi pada sektor-sektor yang lebih kapital-intensif. Penelitian ini menekankan pentingnya pengalokasian pengeluaran modal yang efisien untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di India.

Bongers & Diaz-Roldan (2019) mengkaji pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan stabilitas tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak hanya terjadi di satu sektor, tetapi tersebar merata di berbagai sektor ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja yang merata di berbagai sektor.



(2018) mengkaji peran teknologi dan inovasi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif. Penelitian ini menekankan bahwa inovasi yang tepat dapat menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor-sektor yang

sebelumnya tidak ada. Penelitian ini tidak berfokus pada lokasi geografis tertentu, melainkan mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk memahami hubungan antara teknologi, inovasi, dan pasar kerja di seluruh dunia.

Ziberi et al. (2022) mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Makedonia Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang lebih tinggi untuk pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, tenaga kerja yang terampil dan terdidik menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat langsung berdampak pada penurunan pengangguran di Makedonia Utara.

Penelitian oleh Bayar et al. (2023) mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat pengangguran dan distribusi pendapatan di Turki. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang positif, biaya sosial dan ekonomi yang tinggi akibat pandemi memperburuk ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pengangguran. Penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan fiskal yang memadai untuk mengurangi dampak buruk pandemi terhadap ekonomi dan pengangguran di Turki.

Keseluruhan tinjauan empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi, inflasi, dan kebijakan ekonomi berperan penting dalam mengurangi pengangguran di berbagai negara, termasuk Indonesia, Kenya, India, Makedonia Utara, dan Turki. Di Indonesia, pengeluaran untuk infrastruktur dan investasi sektor padat karya efektif menciptakan lapangan kerja, meskipun ada ketidakseimbangan lapangan kerja dan sektor penyerap tenaga kerja. Di Kenya dan India, pemerintah di sektor infrastruktur juga mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Berbeda dengan negara maju seperti Amerika Serikat, inflasi tinggi lebih dipengaruhi oleh



masalah sisi penawaran dan kekuatan pasar. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan ekonomi terintegrasi yang mencakup pengeluaran publik, investasi sektor padat karya, dan pengendalian inflasi untuk mengurangi pengangguran secara efektif.

